

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Model ECM di susun karena variabel stationer pada first difference dan terdapat hubungan korelasi yang berarti eksisnya hubungan jangka panjang antar variabel yang di uji. Dari hasil regresi, dapat kita simpulkan bahwa dalam jangka pendek ketimpangan pendapatan di Indonesia yang diukur dengan koefisien gini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam jangka pendek tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik dari sisi teori maupun penelitian yang dilakukan oleh Ye Tian (2012), tidak ada yang sesuai dengan hasil penelitian ini. Hal ini bisa dijelaskan, bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya keterbatasan data koefisien gini yang digunakan dalam penelitian ini, mengharuskan peneliti menggunakan data hasil interpolasi menggunakan *eviews*.

Uji regresi ECM menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek di pengaruhi oleh :

Variabel tingkat tabungan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan koefisien -0.234915. Variabel PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan koefisien 0.907208. Variabel koefisien gini memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel laju pertumbuhan penduduk Indonesia memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan koefisien -2.653283. Variabel total investasi di Indonesia tidak memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut 33 provinsi yang ada di Indonesia dari kurun waktu 2007 hingga 2014, terdapat 9 provinsi yang memiliki laju pertumbuhan PDRB dibawah rata-rata laju pertumbuhan PDB Indonesia. Provinsi tersebut antara lain Aceh, Riau, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, NTB, NTT, Kalimantan Timur, dan Papua. Untuk tingkat tabungan, hanya terdapat 5 provinsi yang memiliki tingkat tabungan di atas rata-rata tingkat tabungan Indonesia. Ke lima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 4 sebelumnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa provinsi di Indonesia mempunyai tingkat tabungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Salah satu faktor yang meyebabkannya adalah laju pertumbuhan ekonomi provinsi yang tinggi, dapat dilihat dengan laju pertumbuhan PDB nya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan konsumsi yang semakin meningkat. Uang yang tidak digunakan, lebihnya akan digunakan untuk menabung. Oleh karena itu provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempunyai tingkat tabungan yang tinggi.

Dalam kurun waktu 2007 hingga 2014, terdapat beberapa provinsi yang tingkat PMTB-nya sering di bawah rata-rata tingkat PMTB Indonesia. Provinsi 12 itu antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Namun, pada tahun 2009, D.I Yogyakarta sudah tidak lagi memiliki tingkat PMTB dibawah rata-rata tingkat PMTB Indonesia. Provinsi Banten justru masuk menjadi salah satu provinsi dengan tingkat PMTB dibawah rata-rata tingkat PMTB Indonesia menggantikan D.I Yogyakarta.

Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat PMTB pada tahun 2007 hingga tahun 2014, padahal tingkat tabungannya tinggi pada tahun 2007 hingga 2014. Salah satu penyebabnya adalah, karena sebelumnya tepatnya sebelum tahun 2007, provinsi Sumatera Utara sudah meningkatkan pembangunan provinsinya dengan PMTB yang tinggi. Oleh sebab itu, pada tahun 2007 PMTB nya menurun hingga tahun 2014. Karena PMTB Sumatera Utara sudah mengalami kemajuan yang pesat sebelum tahun 2007.

Terhitung dari tahun 2007 hingga tahun 2014, terdapat 7 provinsi yang selalu mempunyai tingkat koefisien gini yang lebih tinggi dari rata-rata nilai koefisien gini Indonesia. Provinsi tersebut antara lain adalah provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Barat dan provinsi Papua. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk ada beberapa provinsi yang selalu mempunyai laju pertumbuhan penduduk diatas laju pertumbuhan rata-rata Indonesia provinsi tersebut antara lain Riau, Jambi, Kep.Riau, Banten, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat dan provinsi Papua.

6.2 Saran.

- Laju Pertumbuhan PDB

Bagi daerah yang memiliki tingkat laju pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dari provinsi lainnya dapat melakukan kerjasama antar daerah melalui perdagangan yang dapat mengembangkan potensi masing-masing daerah sesuai dengan keunggulannya. Atau dengan mengembangkan potensi perekonomian yang dimiliki daerahnya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan pendapatan asli daerah serta mengurangi ketergantungan dari dana transfer pemerintah pusat. Untuk pemerintah pusat dapat meningkatkan anggaran prioritas daerah dan program pembangunan bagi daerah tertinggal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memenuhi kebutuhan dasar.

- Tingkat Tabungan

Bagi pemerintah pusat ataupun daerah, agar dapat memberikan penyuluhan betapa pentingnya tabungan bagi investasi masa depan. Serta pentingnya tabungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena salah satu sumber investasi berasal dari tabungan. Dan bagi pemerintah daerah agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang nantinya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menabung.

- Tingkat PMTB

Dalam hal ini, ditekankan kepada pemerintah pusat untuk memberikan pembangunan secara merata pada semua provinsi yang ada di Indonesia, sehingga ketimpangan seperti ini dapat di hindari. Khususnya pada pemerintah daerah, agar

dapat mengembangkan wilayah mereka dan memfasilitasi para investor yang mau mengembangkan usaha atau menanamkan modalnya pada daerah yang mereka inginkan. Serta tidak mempersulit mereka dalam hal pengurusan surat perizinan, karena hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat para investor untuk enggan menanamkan modalnya di daerah yang sulit mengurus surat perizinannya.

- Koefisien GINI

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Pemerintah dapat mengurangi ketimpangan dengan tiga cara, yaitu pajak, pengeluaran pemerintah, dan regulasi. Cara selanjutnya adalah realokasikan belanja negara pada sektor-sektor atau kegiatan yang memungkinkan si miskin. Upaya mengatasi ketimpangan dapat sejalan dengan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan. Pemerataan kesempatan merupakan jalan efektif bagi mobilitas sosial. Karena itu, kronisme dan korupsi yang menghambat mobilitas sosial harus diminimalkan.

Untuk pemerintah daerah dapat dilakukan kerjasama antar daerah yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah . Dengan adanya kerjasama antar daerah diharapkan akan mendorong pemerataan pembangunan dan pendapatan antar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan yang berkelanjutan khususnya wilayah yang tertinggal.

- Laju Pertumbuhan Penduduk

Untuk laju pertumbuhan yang tinggi pada beberapa provinsi di Indonesia yang mempengaruhi semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia

setiap tahunnya, dapat dilakukan beberapa cara untuk mengatasinya. Diantaranya adalah dengan lebih menghidupkan lagi program KB untuk membatasi kelahiran, menunda perkawinan, penambahan dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan, mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi. Selain itu pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat yang memiliki kualitas sumber daya yang rendah. Sehingga nantinya laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dapat memberikan dampak yang positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

- Investasi

Kepada pemerintah, agar bisa memberantas korupsi hingga keakar-akarnya. Serta memberikan sanksi yang besar kepada mereka yang melakukan korupsi. Agar investasi yang telah ditanamkan oleh investor kepada Indonesia dapat digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan dan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Serta manfaat investasi sendiri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah juga harus adil dalam melakukan pembangunan berupa infrastruktur dan lebih memperkenalkan daerah yang belum tersentuh oleh investor atau hanya sedikit mendapatkan investasi untuk daerahnya. Sehingga nantinya rekomendasi untuk berinvestasi pada daerah yang memiliki sumberdaya yang unggul namun belum tersentuh investasi oleh pemerintah dapat menarik investor untuk menanamkan investasi di daerah tersebut.

Bagi pemerintah daerah, agar menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat dengan baik untuk pembangunan infrastruktur daerahnya sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Selain itu, kepada pemerintah daerah agar bisa mempermudah pemberian hak izin untuk investor asing/dalam negeri untuk menanamkan modalnya. Selain itu kepada pemerintah daerah diharapkan dapat menggali lagi sumber daya apa saja yang unggul didaerahnya, sehingga hal ini bisa menjadi potensi daerah tersebut dalam bersaing mendapatkan investasi dengan daerah lain.

